

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN DELIK PENGHINAAN
PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP LAMA DAN
KUHP BARU (UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 2023)**

SKRIPSI

Oleh

Ramdan Hadi Saputra

2240050023



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN DELIK PENGHINAAN
PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP LAMA DAN
KUHP BARU (UNDANG-UNDANG NO.1
TAHUN 2023)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Ramdan Hadi Saputra

2240050023



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdan Hadi Saputra
NIM : 2240050023
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ramdan Hadi Saputra
2240050023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa
Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan
KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)”**

Oleh:

Nama : Ramdan Hadi Saputra
NIM : 2240050023
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum
Program sarjana Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 2 Februari 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

(Assoc.Prof Dr. Drs. Tatok Sujianto, S.H., M.H. M.T.L.)
NUPTK: 6450740641130042

Pembimbing II

(Asst. Prof. Radisman Saragih, S.H., M.H.)
NUPTK: 6256736637130043

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NUPTK: 5759741642230062

Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUPTK: 5434757658137093



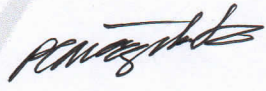
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 2 Februari 2026 Telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ramdan Hadi Saputra
NIM : 2240050023
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., MTL.	Ketua	
2. Radisman Saragih, S.H., M.H.	Anggota	
3. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdan Hadi Saputra
NIM : 2240050023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023).

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 2 Februari 2026



Ramdan Hadi Saputra
2240050023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden Dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Akibat Hukumnya Menurut Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah perubahan karakter tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dari delik umum menjadi delik aduan. Perubahan ini menimbulkan berbagai implikasi yuridis, baik dari aspek perlindungan martabat Presiden sebagai kepala negara maupun dari aspek perlindungan hak kebebasan berpendapat dalam negara hukum yang demokratis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku rector Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Rr. Ani WijAyati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Kristen Indonesia.
7. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H.M.H., MTI., selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang senantiasa mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kasih dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Radisman Saragih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang senantiasa mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kasih dan kesabaran dalam bagian-bagian penulisan skripsi ini.
9. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya bagi Bapak/Ibu Dosen yang selama ini memberikan pengajaran kepada penulis di setiap semesternya.
10. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
11. Keluarga terkasih, kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua atas dukungan doa dan moril, kasih sayang, serta kesabaran kepada penulis selama proses, bahkan sampai terwujudnya skripsi ini.
12. Yang terkasih, kepada teman-teman seangkatan Universitas Kristen Indonesia, yakni Saudara Salomo Okto, Saudari Egi Yuliana, Saudari Oktavia Nianti dan semua teman seangkatan yang dalam hal ini senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis selama proses penulisan bahkan terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 2 Februari 2026
Penulis,



Ramdan Hadi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
VISI DAN MISI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Penulisan	48
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	52
A. Kerangka Teori.....	53
B. Tinjauan Delik Pada Umumnya	59
C. Delik Penghinaan Secara Luas.....	65
BAB III PERBEDAAN PENGHINAAN PRIBADI DENGAN PENGHINAAN DALAM JABATAN PRESIDEN	81
A. Penghinaan Terhadap Pribadi Presiden	82
B. Penghinaan Terhadap Jabatan Presiden	89
C. Persamaan dan Perbedaan	92
D. Penghinaan Terhadap Pribadi dan Jabatan Presiden dalam Praktek Pelaksanaanya	96

BAB IV PENGHINAAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA KE DELIK

ADUAN108

- A. Pada Masa Berlakunya KUHP Lama109
- B. Pada Masa Berlakunya KUHP Baru (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).....116
- C. Analisis Terhadap Perbedaan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Akibat Hukumnya122

BAB V PENUTUP130

- A. Kesimpulan.....130
- B. Saran.....132

DAFTAR PUSTAKA.....133



ABSTRAK

- A. Nama : Ramdan Hadi Saputra
B. NIM : 2240050023
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan
: Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan
dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan
KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)
E. Halaman : i - xii + 133 Halaman, Daftar Pustaka.
F. Kata Kunci : Penghinaan Presiden, Delik Aduan, Delik Biasa,
Hukum Pidana, KUHP Nasional.
G. Ringkasan Isi :

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perubahan tersebut ditandai bagaimana perbedaan penghinaan pribadi dengan penghinaan dalam jabatan Presiden dan bagaimana penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan ini menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait perlindungan martabat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasi perubahan sifat delik tersebut terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penghinaan Presiden menjadi delik aduan dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap kritik yang bersifat konstruktif, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap kehormatan Presiden. Namun demikian, penerapannya memerlukan kehati-hatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.

- H. Daftar Acuan : 20 Buku + 8 peraturan perundang-undangan.
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Drs.Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., MTI.
Dosen Pembimbing II : Radisman Saragih, S.H., M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Ramdan Hadi Saputra
B. NIM : 2240050023
C. Specific Program : Criminal Law
D. Title : *Juridical Analysis on the Change of the Offense of Insulting the President from an Ordinary Offense to Complaint-Based Offense and Its Legal Consequences Under the Old and New Indonesian Criminal Codes (KUHP) – Law No. 1 of 2023.*
E. Page : i - xii + 133 Page, bibliography
F. Keyword : *Insult to the President, Complaint-Based Offense, Public Offense, Criminal Law, Indonesian Criminal Code.*
G. Summary :
The reform of Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces significant changes in the regulation of offenses against the dignity of the President and/or Vice President. The change is reflected in the clear distinction between insults directed at the President in a personal capacity and those directed at the President in the exercise of his official functions, as well as in the reclassification of the offense of insulting the President from an ordinary offense to a complaint-based offense. This shift has generated legal debate, particularly regarding the balance between protecting the President's dignity and safeguarding freedom of expression in a democratic rule of law.
This study aims to juridically analyze the regulation of the offense of insulting the President under Law Number 1 of 2023 and to examine the legal implications of changing the nature of the offense. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively to obtain comprehensive and systematic conclusions.
The findings indicate that the transformation into a complaint-based offense is intended to prevent excessive criminalization of legitimate criticism while ensuring proportional legal protection for the President's honor.
H. Reference : 20 Books + 8 legislation
I. Thesis Advisor I : Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., MTI.
Thesis Advisor II : Radisman Saragih, S.H., M.H.